

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral”. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Namun pada kenyataannya pengalaman sejarah tampaknya belum membuka perspektif pemikiran baru,¹ jika dilihat pada era sekarang, konsep penegakan hukum di negeri ini malah semakin lemah. Tidak ada sinkronisasi antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Masing-masing instansi penegak hukum tersebut merasa berkuasa dan merasa mandiri sehingga terjadi kompetensi yang mengakibatkan bukan saja hapusnya sinkronisasi dan keterpaduan, melainkan hilangnya atau pupusnya hierarki mekanisme kontrol antara instansi penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain.²

Hukum bukan suatu persona untuk dipersalahkan atau dituding. Untuk itu perlu dimintakan pertanggungjawaban dari mereka yang oleh hukum sudah

¹ J.E. Sahetapy, 2009, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, hal. 165.

² Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Galangpress, hal. 5.

dilegitimasi untuk menciptakan dan menyusun serta mengatur hukum dalam pelbagai perwujudan.³ Yang diharapkan bisa melahirkan serta menciptakan sebuah perdamaian dan keadilan. Dikatakan bahwa perdamaian tanpa adanya keadilan adalah sebuah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan. Kemelut yang terdramatisir sedemikian rupa dalam tubuh penegakan hukum yang kaitannya dengan sistem peradilan pidana inilah kemudian memunculkan anggapan, “pendekatan dalam sistem peradilan pidana selama ini sangat sulit terkontrol bahkan cacat” baik dari sisi penegak hukumnya maupun sisi keadilan dari sudut pandang korban/ masyarakat dan pelaku tindak pidana. Yang notabene hanya dilihat bahwa adanya suatu kejahatan maka negara berhak menggelar peradilan pidana dan setelahnya mencari-cari kesalahan pelaku dengan diikuti pemberian sanksi untuk mencela kepadanya (pelaku), menghadirkan penderitaan, yang pada akhirnya menuju jalan keterasingan (penjara). Terlihat bahwa falsafah kebudayaan berupa pemberdayaan (*empowerment*) sebagai orang pribumi sebagaimana semestinya telah hilang, lebih kepada suatu tuntunan peninggalan nenek moyang jaman kolonial yaitu *retributive justice* yang memandang kejahatan, sebagai pelanggaran terhadap negara. *Tagline* yang khas dari *retributive justice* ini dikatakan, “*Who is at fault then the criminal sanctions imposed prepared*” atau siapa yang bersalah maka sanksi pidana siap dijatuhkan.

Tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan memberikan penghukuman berupa pengasingan menjadi jalan terakhir bagi setiap pelaku tindak pidana. Bagaimanapun pengasingan yakni pemenjaraan

³ J.E. Sahetapy, 2009, *Op. Cit*, hal. 56.

bukanlah suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Ironis, jika mengkondisikan kejahatan sebagai sebuah keniscayaan, bahkan keharusan (pemberian *punishment*). Jangan menjadi seperti mereka (pembuat aturan era kolonial), di mana orang-orang yang tidak mampu berdialog dengan hati nurani dan memasrahkan diri kepada tatanan yang terlanjur irasional dan bengkok.⁴ Justru sebaliknya dengan menggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila Keempat Pancasila, yakni musyawarah merupakan prioritas yang utama untuk mencapai kebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulah dalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan melakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi dengan harapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakat nantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai *restorative justice*.

Perkembangannya terkini keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana para pelaku yang bersalah.⁵ Yang dalam upayanya ditempuh dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah (mediator). Kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui

⁴ Agus Sudibyo, 2013, *Habitus Politik dan Keniscayaan Korupsi*, Sumber : Koran Tempo, Terbit Kamis, 24 Oktober 2013, Rubrik Pendapat, hal. A10.

⁵ Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse, hal. 194.

mekanisme *restorative justice* pada umumnya merupakan kasus-kasus yang sifatnya ringan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Penulis dalam tulisannya memberikan beberapa contoh kasus yang lebih difokuskan kepada tindak pidana pencurian yang dilakukan masyarakat kecil, yakni sebagai berikut:

- Pada Mei tahun 2011 seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah;
- Kasus Nenek Minah pada pertengahan Agustus 2009 harus dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan tuduhan mencuri buah kakao sebanyak 3 buah milik perkebunan PT Sari Antan 4. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Dan sebelumnya pun Nenek Minah sudah menjalani tahanan rumah sejak 13 Oktober sampai 1 November 2009.

Untuk kasus yang pertama menjadikan sandal jepit mendunia, banyak media asing merespon kasus tersebut dengan menjadikannya sebuah berita dengan judul-judul, "*Indonesians Protest With Flip-Flops*", "*Indonesians have new symbol for injustice: sandals*", "*Indonesia's Flip-Flop Revolution*", "*Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice*", maupun "*Indonesians fight injustice with sandals*". Dengan tema besarnya tentang ketidakadilan yang diperoleh oleh pencuri sandal yang pelakunya seorang anak. Telah ditegaskan pada Pasal 66 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “ penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Maka jelas

seharusnya dalam kasus sandal jepit ini alangkah eloknya diselesaikan dengan tidak membawa ke jalur hukum seperti halnya pula untuk kasus nenek Minah yang dalam penyelesaian kasus pencurian buah kakao diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum. Sudah saatnya memanusiakan peradilan sebagai tujuan untuk membangun resolusi konflik yang lebih mengedepankan suatu proses yang terbuka, memberikan wahana mediasi terhadap korban, pelaku, dan masyarakat agar tercipta suatu jawaban atas kebutuhan mereka yang lama ingin dirasakan yaitu berupa keadilan.

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul :

“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (*Study Kasus Polsek Gondangredjo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo*)”

B. RUMUSAN MASALAH

Menilik dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, maka penulis melihat terdapat suatu permasalahan yang dapat dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang kemudian akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Pertimbangan apa saja yang menjadikan penegak hukum (Polisi) di Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangredjo dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga menggunakan pendekatan *restorative justice*?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan pendekatan *restorative justice*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap suatu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangredjo Kab. Karanganyar.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan pendekatan *restorative justice*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan serta hukum pidana pada khususnya mengenai penerapan *restorative justice* terhadap suatu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi khususnya di dalam wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar, dan bagaimana akibat yang akan ditimbulkan apabila pendekatan secara kekeluargaan (*restorative justice*) menjadi alternatif solusi dalam perkara tindak pidana pencurian.
 - b) Menambah bahan kepustakaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusunan karya ilmiah lainnya.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan di bidang penegakan hukum agar lebih mengakomodir hak dan kepentingan korban, masyarakat serta pelaku tindak pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang hakiki. Karena baik pihak korban, masyarakat, dan pelaku membutuhkan suara dan perlu adanya cara atau solusi baru yang lebih mengedepankan pemberdayaan dari kearifan lokal yang ada untuk bergerak maju, yang akan memungkinkan mereka untuk terus hidup bersama dalam keadaan aman dan lingkungan yang stabil tanpa ada konflik lagi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan,⁶ ungkapan hukum ini sejatinya telah menunjukkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum (*no one is above the law*) dan bahwa setiap orang sama di depan hukum (*equal before the law*).⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dalam Pasal 28D ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hukum sendiri adalah suatu alat untuk meraih salah satu tujuan elementer berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan. Bila hukum dan segenap perangkatnya, termasuk para aparatnya, sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, sudah dipastikan keadilan tak akan terjadi. Kehidupan akan

⁶ Franz Magnis – Suseno, 1999, *Etika Politik (Prinsip – prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 115.

⁷ J.E Sahetapy, 2009, *Op. Cit*, hal. 52.

semrawut, kacau. Setiap orang akan merasakan “kegamangan” hukum.⁸ Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak lemah.⁹ Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara.¹⁰

Namun selama ini ketika terjadi suatu tindak kejahatan maka yang ada dalam benak kita adalah seseorang tersebut harus segera dijatuhi hukuman untuk kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Berdasarkan fakta, penjara setiap tahunnya bertambah penghuninya hingga *over* kapasitas seperti kasus yang menimpa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta pada bulan Juli 2013, yang terjadi pada peristiwa ini kontradiktif dengan yang selama ini diperjanjikan untuk para narapidana bahwa LAPAS sebagai sarana untuk merubah diri dari yang mensuri tauladani hal buruk untuk kembali ke jalan fitrah yang sesungguhnya kepada kebaikan, tapi nyatanya tidak bisa berjalan seperti yang diperjanjikan. Dari sistem pemidanaan berupa pemenjaraan banyak mendapatkan kritikan-kritikan, Foucault mengungkapkan jika dengan penjara :

1. Tidak mengurangi angka kriminalitas;
2. Malah melahirkan residivis;
3. Penjara tidak pernah gagal melahirkan orang yang menyimpang;

⁸ Pongki Pamungkas, 2013, *Supremasi Hak atas Kewajiban Asasi Manusia*, Sumber: Koran Tempo, terbit Sabtu, 14 September 2013, Rubrik: Pendapat, hal. A11.

⁹ Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 52.

¹⁰ *Ibid*, hal. 53.

4. Memungkinkan bahkan menyokong lahirnya organisasi penyimpangan yang banyak antara satu dengan yang lainnya, ter-hierarki, siap untuk saling membantu tindakan kriminal di masa depan.
5. Kondisi di mana narapidana yang telah dibebaskan dilabeli dengan residivis.
6. Penjara secara tidak langsung menghasilkan orang yang menyimpang dengan mengabaikan keluarga narapidana ke lembah kemiskinan.

Hal ini disebabkan karena sampai sekarang sistem peradilan pidana di Indonesia hanya mengenal sistem penghukuman yang bersifat menghukum atau pembalasan (retributif). Dan timbul suatu pertanyaan, “Mengapa suatu kejahatan selalu prioritas utama yang di ambil berupa penghukuman pidana?”

Para penulis barat dalam menyikapi pertanyaan tersebut kemudian memunculkan beberapa teori berkaitan mengenai tindak kejahatan dengan hukuman pidana. Teori-Teori tersebut adalah :¹¹

1. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana apabila seseorang melakukan kejahatan.

2. Teori Relatif atau Nisbi

Menurut Teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Hal yang harus dipersoalkan adalah perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku itu sendiri. Teori ini disebut juga Teori Tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan terhadap upaya-upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan tidak berulang kembali.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 19-20.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.

Menilik kembali pada kasus pencurian sandal serta pencurian 3 buah kakao yang pelakunya masing-masing seorang anak dan seorang lansia dengan motivasi atas tindakannya dengan alasan ekonomi dapatlah dijadikan sebagai suatu pengantar yang cukup, dalam mempromosikan konsep *restorative justice* dalam proses *criminal justice system* di Indonesia.¹² Dalam kasus yang sama (pencurian) bertempat di Elmira, Ontario pada tahun 1974 secara tidak sengaja ketika petugas pengawas percobaan yang berkeinginan agar pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dengan cara mendatangi setiap korban, di mana pelaku bertanggung jawab telah melakukan sebanyak 22 pencurian.¹³ Meskipun cara yang dilakukan tidak direncanakan secara baik, namun dengan didasarkan pada niat dan tujuan pelaku dengan mau bertanggung jawab kepada korban-korbannya, berhasil menghadirkan suatu hubungan resolusi konflik dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Dengan yang awalnya dibarengi inisiatif dari petugas pengawas percobaan, melihat apabila dalam kasus pencurian ini di mana kerugian yang ditimbulkan kepada korban serta masyarakat masih dapat direstorasi sehingga keadaan yang merugikan mereka dapat dikembalikan seperti semula.

¹² Jecky Tengens, 2011, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, diakses Rabu, 02 Oktober 2013 pukul 21.10 WIB

¹³ William C. Vickrey, 2006, *Balanced And Restorative Justice an Information manual for California*, California: Administrative Office of The Courts, hal. 3.

Restorative justice sendiri dapat didefinisikan sebagai respons terhadap perilaku kriminal dengan memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan, dan untuk memfasilitasi perdamaian dan kesentosaan di antara kelompok yang menentang.¹⁴ *Restorative Justice* memiliki persyaratan khusus sebelum dilaksanakan, antara lain :

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian konflik di luar sistem pengadilan pidana.
3. Persetujuan dari kepolisian.
4. Dukungan komunitas setempat.

Hadirnya alternatif dalam solusi penyelesaian *restorative justice* diharapkan menjadikan penegak hukum kita sebagai seorang mediator yang lebih arif-bijaksana dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang lebih mengutamakan pemberdayaan, karena keadilan tidak serta-merta ditentukan oleh setiap redaksi yang tertulis pada Pasal-pasal atau otoritas negara saja. Karena penegak hukum di Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai mediator seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “*Judex mediator*” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara

¹⁴ Andi Akbar (ed), 2006, *RESTORASI: Mencari Alternatif Edisi IV / Volume I*, Bandung: LAHA, hal. 27.

pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini mengenai:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sekaligus menganalisa secara sistematis data yang berkenaan dengan kasus-kasus tindak pidana pencurian serta pendayagunaan mekanisme *restorative justice* yang dilakukan dalam penyelesaiannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini berupa mengkaji aspek-aspek normatif dan pendekatan sosiologis dalam praktek pelaksanaan sistem peradilan pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa norma dasar negara kita yang berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif)¹⁶ yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagainya.

¹⁵ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/.../3.pdf, diakses Kamis, 03 Oktober 2013 pukul 16.00 WIB

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 154.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah¹⁷, berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, dan juga makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang keberadaannya menunjang dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti situs internet dan artikel lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- 2) Penelitian melalui data lapangan dengan mengkaji data primer yang terdiri dari *interview* / wawancara, observasi / pengamatan.
- 3) Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara melakukan analisis data hasil literatur/kepuustakaan, wawancara, dan pengamatan melalui studi lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang penulis susun terdiri dari empat bab, setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Uraian dari masing-masing bab dan sub-babnya adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan merupakan bagian yang berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁷ *Ibid*, hal. 155.

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

BAB II Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori berupa penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan persoalan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan umum tentang *restorative justice* (keadilan restoratif).

BAB III Pada bab ini merupakan titik temu dari suatu kesenjangan antara permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realita hukum yang ada di lapangan. Oleh karenanya dalam penyajiannya sedapat mungkin singkat, padat dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian guna memudahkan dalam hal pemahaman oleh pembaca terhadap penelitian dan pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis, jadi bab hasil penelitian dan pembahasan dibagi menjadi:

Pertama, halaman yang memberikan penjelasan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar.

Kedua, halaman yang memberikan penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan pendekatan *restorative justice*.

BAB IV Kesimpulan dan Saran